

**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN EKONOMI
PEREMPUAN MELALUI PROGRAM PNM MEKAAR SYARIAH
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

**RANIA DYAH AGUSTIN
NPM. 1751010210**

Program Studi : Ekonomi Syari'ah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN EKONOMI
PEREMPUAN MELALUI PROGRAM PNM MEKAAR SYARIAH
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



Pembimbing I : Dr. H. Rubhan Masyur. M.Pd

Pembimbing II : Diah Mukminatul Hasyimi, S.E.I., M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Analisis Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program PNM Mekaar Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih)**”. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program PNM Mekaar Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program PNM Mekaar Syariah yang dilakukan di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih dan untuk mengetahui program PNM Mekaar Syariah dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan tentang Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program PNM Mekaar Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih. Cara pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat diketahui bahwa kualitas dan kapabilitas SDM, pendapatan, tabungan, konsumsi, dan produksi mengalami peningkatan setelah anggota mendapatkan pinjaman komersial di PNM Mekaar Syariah. Tinjauan ekonomi Islam terhadap program PNM Mekaar Syariah sudah sesuai dengan prinsip pemberdayaan ekonomi perempuan perspektif ekonomi Islam antara lain: prinsip al-‘adl, prinsip persamaan, prinsip partisipasi, prinsip etos kerja, dan prinsip ta’awun. Sedangkan dalam perhitungan pembiayaan *mudharabah* sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Implementasi, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Program PNM Mekaar Syariah.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

SURAT PERSETUJUAN

Judul : Analisis Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Program PNM Mekaar
Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Gunung Sugih Raya,
Kecamatan Gunung Sugih)
Nama : Rania Dyah Agustini
NPM : 1751010210
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Rubhan Masyur, M.Pd
NIP. 196604021996031001


Diah Mukminatul Hasyimi, S.E.I., M.E.Sy
NIP.

Ketua Jurusan,


Madnasir, S.E., M.Si
NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Analisis Implementasi pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program PNM Mekar Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih)" disusun oleh RANIA DYAH AGUSTIN, NPM : 1751010210, program studi Ekonomi Syariah, Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/ Tanggal: Selasa, 26 Oktober 2021.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Samsul Hilal, M.Ag

Sekretaris : Taufiqurrahman, S.E., M.Si

Penguji I : Nurlaili, M.A.

Penguji II : Dr. H. Rubhan Masyur, M.Pd

Penguji III : Diah Mukminatul Hasyimi, S.E.I., M.E.Sy

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghoftur, M.Si
NIP. 198008012003121001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubahnya”

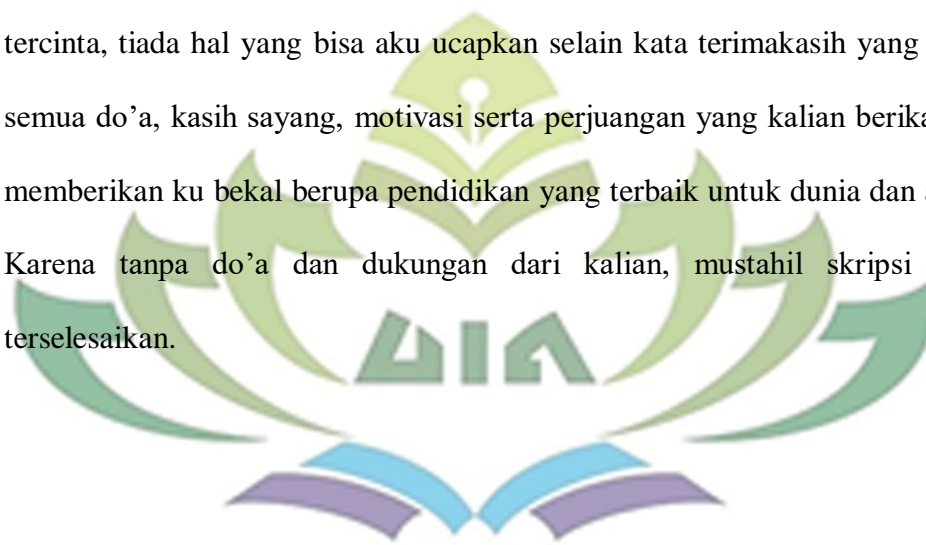
(Q.S. Ar-Ra'd (13) : 11)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohiim..

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan tugas akhirnya. Karya tulis ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam dan penuh cinta kepada kedua orang tua ku, Ayahanda Ramlan Jayani dan Ibunda Dwi Widiati tercinta, tiada hal yang bisa aku ucapkan selain kata terimakasih yang indah atas semua do'a, kasih sayang, motivasi serta perjuangan yang kalian berikan, dengan memberikan ku bekal berupa pendidikan yang terbaik untuk dunia dan akhirat ku. Karena tanpa do'a dan dukungan dari kalian, mustahil skripsi ini dapat terselesaikan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama lengkap Rania Dyah Agustin, putri sulung dari pasangan Ayah Ramlan Jayani dan Ibu Dwi Widiati lahir di Bandar Lampung pada tanggal 1 agustus 1999. Jenjang pendidikan dimulai dari SD di SD Negeri 1 Gunung Sugih, Lampung Tengah ditempuh dari Tahun 2005 diselesaikan pada Tahun 2011, selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Gunung Sugih, Lampung Tengah ditempuh dari Tahun 2011 dan diselesaikan pada Tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan SMA di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, Lampung Tengah ditempuh dari tahun 2014 dan diselesaikan pada Tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan ke jenjang S1 di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil Program Studi Ekonomi Syari'ah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017/2018.

Bandar Lampung, 29 September 2021

Yang membuat,

Rania Dyah Agustin
NPM. 1751010210

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmtullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* kepada Allah SWT yang telah memberikan atas segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang, serta anugerah yang tak terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan pujian kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan contoh akhlakul kharimah bagi seluruh muslim di seluruh penjuru dunia.

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Syariah S1 Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, dengan judul : **"Analisis Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program PNM Mekar Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih)"** ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik petunjuk maupun saran, langsung maupun tidak langsung terutama di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Namun inilah terbaik yang dapat penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih

yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan 1, 2, dan 3.
2. Madnasir, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. Rubhan Masyur. M.Pd selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan telah banyak memberikan arahan dan dengan sabar membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Diah Mukminatul Hasyimi, S.E.I., M.E.Sy selaku pembimbing II yang senantiasa sabar dan meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi terbaiknya serta membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis, semoga ilmu yang telah diberikan dapat penulis amalkan dalam kehidupan.
6. Seluruh Staf Administrasi dan juga seluruh karyawan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.
7. Dessy Vita Bela, Isnatur, Cikita Dewi Selaku pimpinan, sekretaris dan bendahara PNM Mekaar Syariah Gunung Sugih Raya, Gunung Sugih yang

telah memberikan izinnya dan membantu penulis hingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 29 September 2021

Penulis

Rania Dyah Agustin
NPM. 1751010210

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iv |
| PENGESAHAN..... | v |
| MOTTO..... | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| RIWAYAT HIDUP..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 4 |
| C. Identifikasi dan Batasan Masalah..... | 13 |
| D. Rumusan Masalah | 14 |
| E. Tujuan Penelitian | 15 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 15 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan | 16 |
| H. Metode Penelitian..... | 18 |
| I. Metode Penelitian..... | 19 |
| 1. Lokasi Penelitian | 19 |
| 2. Jenis Penelitian | 19 |
| 3. Sumber Data..... | 20 |
| 4. Metode Pengumpulan Data..... | 21 |
| 5. Populasi dan Sampel..... | 23 |
| 6. Analisis Data | 24 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan..... | 29 |
| 1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi..... | 29 |
| 2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Perempuan | 31 |
| 3. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dalam Perspektif Islam..... | 33 |
| 4. Indikator-indikator Dampak Pemberdayaan Ekonomi Perempuan..... | 40 |
| 5. Strategi Pemberdayaan | 42 |
| B. PNM Mekaar Syariah..... | 43 |
| 1. Pengertian PNM Mekaar Syariah..... | 43 |
| 2. Akad dalam PNM Mekaar Syariah..... | 44 |
| 3. Tujuan PNM Mekaar Syariah | 67 |
| C. Ekonomi Islam | 68 |
| 1. Pengertian Ekonomi Islam | 68 |
| 2. Dasar Hukum Ekonomi Islam | 69 |
| 3. Ruang Lingkup Ekonomi Islam | 71 |
| 4. Nilai-nilai Ekonomi Islam..... | 72 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | 74 |
| 1. Sejarah Berdirinya PNM Mekaar Syariah | 74 |
| 2. Visi, Misi, Tujuan PNM Mekaar Syariah | 75 |
| 3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas PNM Mekaar Syariah..... | 77 |
| 4. Produk dan Akad PNM Mekaar Syariah | 80 |
| 5. Operasional Kerja PNM Mekaar Syariah | 82 |
| B. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Program PNM Mekaar Syariah di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah..... | 82 |
| 1. Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Program PNM Mekaar Syariah yang dilakukan di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih | 83 |

| | |
|---|----|
| 2. Program PNM Mekaar Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih..... | 83 |
|---|----|

BAB IV ANALISIS DATA

| | |
|--|-----|
| A. Analisis Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Program PNM Mekaar Syariah yang dilakukan di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih | 124 |
| B. Analisis Program PNM Mekaar Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam..... | 127 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 133 |
| B. Saran..... | 134 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 3.1 : Laporan Perkembangan Anggota PNM Mekaar Syariah | 78 |
| Tabel 3.2 : Hasil Wawancara Nasabah Pembiayaan PNM Mekaar Syariah Tahun 2021 | 84 |
| Tabel 3.3 : Jumlah Pembiayaan dan Anggota Pembiayaan Mudharabah | 116 |
| Tabel 3.4 : Daftar Pinjaman PNM Mekaar Syariah..... | 117 |
| Tabel 3.5 : Pembagian Keuntungan diakhir Periode Pembiayaan..... | 121 |



DAFTAR GAMBAR

Halaman

| | |
|--|---|
| Gambar 2.1 : Skema Akad Mudharabah | 6 |
| Gambar 3.1 : Struktur Organisasi PNM Mekaar Syariah..... | 8 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis membahas lebih jauh proposal penulisan ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan makna yang terdapat pada judul. Hal Ini untuk menghindari interpretasi yang berbeda antar pembaca. Oleh karena itu, perlu dijelaskan pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul makalah ini. Penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah berjudul ” **ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI PROGRAM PNM MEKAAR SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM, (Studi Pada Desa Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih)**”. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat atau menguraikan pokok persoalan atas bagian- bagian atau hubungan bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.¹

2. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata

¹ Peter Salim, Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press 1999), h.61

Implementasi dimaknai dengan pelaksanaan; penerapan.² Sedangkan Puji Meilita Sugiana memaknai implementasi kebijakan sebagai sebuah kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan dari kebijakan tersebut.³

3. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Pengertian kata pemberdayaan: Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata daya yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak.⁴ Menurut Kartasasmita arti pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat.⁵

Pengertian ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos adalah rumah tangga dan nomos berarti mengatur. Berdasarkan pengertian tersebut, ekonomi dapat diartikan sebagai upaya untuk mengelola rumah tangga. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan melalui tiga kegiatan utama: produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemenuhan hidup

² Sri Sukesri Adiwimarta, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 327.

³ Puji Meilita Sugiana, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan*, (Jakarta: Program Studi administrasi Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2012) hlm. 16

⁴ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 188.

⁵ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), hlm. 145

dengan kendala terbatasnya sumber daya, erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan.⁶ Dalam penelitian ini perempuan didefinisikan sebagai orang dewasa yaitu ibu rumah tangga di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih. Berdasarkan definisi di atas, pemberdayaan ekonomi perempuan mengacu pada kemampuan membangun masyarakat, terutama ibu rumah tangga, dengan mengembangkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan.

4. PNM Mekaar Syariah

PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro, melalui:⁷

- a. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan;
- c. Pembiasaan budaya menabung;
- d. Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis

Perspektif Ekonomi Islam

5. Perspektif Ekonomi Islam

Dalam skripsi ini maksudnya yaitu ditinjau dari sudut pandang

⁶ Gunawan Sumodinigrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 24.

⁷ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>

ekonomi keislaman, yakni, sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai normatif ajaran Islam yang bertujuan memberdayakan ekonomi umat Islam secara adil.⁸

6. Desa Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih

Desa Gunung Sugih Raya, suatu wilayah pemerintah tingkat desa yang berada di Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan pedagang.

Berdasarkan penegasan masing-masing istilah dalam judul laporan penelitian ini, maka secara keseluruhan makna judul tersebut adalah suatu penelitian mengenai analisis implementasi pemberdayaan ekonomi perempuan pada masyarakat khususnya perempuan di Desa Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih melalui program PNM Mekaar Syariah ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam yang menekankan pada prinsip musyawarah dan keadilan.

B. Latar Belakang Masalah

Saat ini, dalam era reformasi, kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia. Kemiskinan terus melanda Indonesia, meski negara tersebut sedang mengalami perkembangan ekonomi. Banyaknya perusahaan, pabrik industri dan perkantoran yang didirikan di Indonesia terkadang masih belum bisa mengentaskan kemiskinan. Banyak pabrik dan kantor yang menyediakan

⁸ Mohamad Hidayat, Pengantar Ekonomi Syariah, Penerbit Zikrul Hakim, Jakarta, 2010, h.

pekerjaan bagi orang-orang dengan riwayat pendidikan minimal SMA / sederajat. Namun terlihat bahwa rata-rata tingkat pendidikan mereka yang tergolong miskin hanya dapat dicapai oleh Sekolah Dasar (SD). Dalam hal ini, orang dengan pendidikan rendah mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melamar pekerjaan di perusahaan atau kantor. Oleh karena itu, dalam hal ini angka pengangguran akan meningkat dan kemiskinan akan semakin parah.

Kesenjangan sosial antara kelas menengah ke bawah dan kelas menengah atas terus berlanjut. Kurangnya keterampilan sumber daya manusia dan distribusi pendapatan yang tidak merata dapat dikatakan menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Sekalipun seseorang memiliki keterampilan tetapi tidak memiliki dukungan finansial untuk mencapai suatu pekerjaan, orang tersebut tetap tergolong penduduk miskin. Hal ini memperlebar jurang antara kaya dan miskin di Indonesia.

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung bulan Agustus 2020, mengungkapkan keadaan menjadi lebih baik dibandingkan pada Agustus 2019. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja dan penurunan jumlah pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan indikator utama perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. jumlah Angkatan Kerja di Lampung sebanyak 4,49 juta orang, naik sebanyak 127,8 ribu orang dari Agustus 2019. Hal ini sejalan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang naik sebesar 1,10 poin. Dalam

setahun terakhir, TPT naik sebesar 0,64 poin. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 9,21 persen.⁹

Gambar 1.1
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama,
Agustus 2018 - Agustus 2020

| Status Keadaan Ketenagakerjaan | Agustus 2018 | Agustus 2019 | Agustus 2020 | Perubahan 1 Tahun (Agustus 2019-Agustus 2020) | |
|---|--------------|--------------|--------------|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | Ribu Orang | Ribu Orang | Ribu Orang | Ribu Orang | Persen |
| Penduduk Usia Kerja | 6 233,1 | 6 315,8 | 6 399,5 | 83,7 | 1,33 |
| Angkatan Kerja | 4 339,3 | 4 361,9 | 4 489,7 | 127,8 | 2,93 |
| Bekerja | 4 163,8 | 4 186,2 | 4 280,1 | 93,9 | 2,24 |
| Pengangguran | 175,5 | 175,7 | 209,6 | 33,9 | 19,31 |
| Bukan Angkatan Kerja | 1 893,9 | 1 954,0 | 1 909,9 | -44,1 | -2,26 |
| | Persen | Persen | Persen | | Poin |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 4,04 | 4,03 | 4,67 | | 0,64 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 69,62 | 69,06 | 70,16 | | 1,10 |

Keterangan: Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015

Meski situasi menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Lampung telah menurun, namun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat miskin. Kegiatan pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Hal ini sejalan dengan prinsip dan tujuan pemberdayaan yang tertuang dalam “UU No. 20 tahun 2008”.

Pemberdayaan merupakan sebuah upaya dalam aspek muamalah yang sangat penting terkait dengan pembinaan dan perubahan masyarakat. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa perubahan adalah hal yang terpenting, di mana perubahan dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu

⁹ Badan Pusat Statistik, “Persentase Ketenagakerjaan Provinsi Lampung 2020 “ dalam <https://lampung.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/864/keadaan-ketenagakerjaan-provinsi-lampung-agustus-2020.html>.

dengan pemberdayaan oleh lembaga terkait. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS: Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut :

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Dalam hal ini terlihat sangat jelas bahwa umat manusia diminta untuk berusaha dan berupaya untuk mencapai suatu perubahan dalam kehidupannya. Salah satu upaya perubahan itu dapat dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.¹⁰ Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah solusi yang terbaik untuk dilakukan jika kehidupan masyarakat ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Suatu perubahan hidup dapat dicapai ketika tingkat kemiskinan semakin menurun, partisipasi kerja baik laki-laki maupun perempuan seimbang, pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, dan pendapatan semakin meningkat. Dengan pemberdayaan, masyarakat akan lebih berdaya dan lebih produktif untuk meningkatkan kesejahteraan

¹⁰ Tomi Hendra, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an", *Hikmah*, Vol. XI, No. 02, (Desember, 2017), 31.

keluarganya.

Bersumber dari data ketenagakerjaan pemerintah kabupaten Lampung Tengah tahun 2019, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah 57,05 % dan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki mencapai 89,87 %.

Tingkat pengangguran perempuan mencapai 3,53 % sedangkan tingkat pengangguran laki-laki 1,89 %.¹¹

Gambar 1.2

| Jenis Kegiatan <i>Type of Activity</i> | Laki-Laki <i>Male</i> | Perempuan <i>Female</i> | Jumlah <i>Total</i> |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I. Angkatan Kerja/Economically Active | | | |
| 1. Bekerja/Working | 418.135 | 253.173 | 671.308 |
| 2. Penganggur Terbuka/Unemployment | 8.055 | 9.275 | 17.330 |
| II. Bukat Angkatan Kerja / Not Economically Active | | | |
| 1. (Sekolah) (Attending School) | 21.115 | 29.059 | 50.174 |

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| 2. (Mengurus Rumah Tangga) (Housekeeping) | 14.735 | 156.419 | 171.154 |
| 3. (Lainnya) (Others) | 12.165 | 12.114 | 24.279 |
| Jumlah/Total | 474.205 | 460.040 | 934.245 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja <i>Labor Force Participation Rates (%)</i> | 89.87 | 57.05 | 73.71 |
| Tingkat Pengangguran <i>Unemployment Rates (%)</i> | 1.89 | 3.53 | 2.52 |

SUMBER : Lampung Tengah Dalam Angka 2019

¹¹ <https://Documents.pemerintahco.id/Kabupaten.Lampung.Tengah.html>

Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi kerja perempuan di Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah masih rendah, dan tingkat pengangguran perempuan di Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah masih tergolong tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran laki-laki. Beberapa isu tersebut kerap melanda ketika perempuan ingin berkiprah di dunia kerja.

Idealnya, perempuan membutuhkan keadilan dan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan sehari-hari dengan laki-laki, serta keadilan di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Namun keinginan tersebut sulit untuk diwujudkan. Misalnya dalam bidang ekonomi, perempuan biasanya tidak berperan aktif dalam perekonomian keluarga. Saat wanita menikah, ketimpangan akan muncul dalam kehidupan masyarakat. Kebanyakan wanita yang sudah beristri hanya bisa menjadi ibu rumah tangga dan selalu mengandalkan penghasilan suaminya. Karenanya, peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan solusi terbaik saat ini untuk menjadikan perempuan lebih mampu, produktif dan terampil.

Salah satu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan pemberdayaan di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih untuk mendukung perekonomian masyarakat adalah lembaga keuangan syariah bernama PNM Mekaar Syariah. Banyak kasus sulitnya memperoleh modal komersial karena ketatnya persyaratan peminjaman uang dari bank, sehingga pengusaha kesulitan untuk melakukan usaha karena kekurangan modal.

PNM Mekaar Syariah hadir untuk membantu masyarakat di antara lembaga keuangan lainnya, terutama lembaga keuangan yang menysasar pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UKM).¹² Program tersebut dirumuskan oleh pemerintah pada 1 Juni 1999, kemudian program ini melakukan transformasi bisnisnya dengan meluncurkan produk PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) yang memberikan pembiayaan langsung kepada pengusaha mikro dan kecil. Program tersebut mendiversifikasi sumber pendanaannya dengan menggandeng pihak ketiga (bank dan pasar modal). PNM Mekaar (Mendorong Ekonomi Keluarga Sejahtera) memberikan layanan khusus kepada perempuan miskin yang merupakan wirausaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha. Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia, termasuk krisis ekonomi tahun 1997, telah meningkatkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta prospeknya di masa depan.

Tugas pemberdayaan dilakukan dengan memberikan jasa pembiayaan dan jasa manajemen yang merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah (terutama kontribusinya pada industri riil) untuk mendukung usaha baru yang memiliki prospek usaha dan peluang penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan pengusaha. Dalam Program Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan oleh PNM Mekaar Syariah, program tersebut bertujuan

¹² <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>

untuk memperkuat status kesetaraan perempuan dengan laki-laki.¹³

PNM Mekaar Syariah adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang didasarkan pada Fatwa dan / atau Pernyataan Kepatuhan Islam Majelis Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang bertujuan untuk mewariskan pengusaha ultra mikro. Perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro, melalui :¹⁴

1. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga;
2. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan;
3. Pembiasaan budaya menabung;
4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis

Program Mekaar Syariah dilaksanakan melalui indoktrinasi usaha sesuai syariat Islam yaitu :

1. Pertemuan mingguan yang wajib dilakukan secara disiplin dan tepat waktu dengan mengucapkan doa, janji nasabah, janji account officer mekaar syariah, janji bersama.
2. Nasabah Mekaar syariah adalah mereka yang telah mempunyai usaha, atau akan melakukan usaha, atau yang pernah usaha karena sudah mempunyai pengalaman usaha sebelumnya sesuai syariat islam.
3. Nasabah wajib memiliki usaha setelah diberikan pembiayaan.
4. Dari penerima sedekah menjadi pemberi sedekah. koperasi ini

¹³ Dewi Ayu Hidayati, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Perempuan Islam Aisyiyah Provinsi Lampung", Jurnal Sosiologi, Vol. 15, No. 2, 88.

¹⁴ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>

berlandaskan hukum Islam.

Diharapkan program ini mampu menunjukkan komitmen dan kiprahnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan dan lapangan kerja. Sejalan dengan “visi lembaga keuangan terkemuka berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik untuk memberikan nilai tambah bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) secara berkelanjutan.” Kegiatan program difokuskan pada membantu Ibu rumah tangga setempat melakukan kegiatan produksi untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan membangun keluarga yang sejahtera. Tujuan dari rencana tersebut adalah untuk memberikan pinjaman modal komersial tambahan kepada anggota PNM. Dengan pemberian kredit modal komersial, PNM diharapkan dapat berperan dalam mengembangkan potensi simpan pinjam di pedesaan, sehingga memudahkan anggota PNM untuk mendapatkan bantuan modal komersial. Terutama usaha mikro untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kegiatan kelembagaan perempuan untuk mengentaskan kemiskinan keluarga di pedesaan.¹⁵ PNM Mekaar Syariah diwujudkan dengan memberikan pinjaman modal kerja untuk digunakan sebagai tambahan modal usaha bagi perempuan (khususnya ibu rumah tangga) untuk mengembangkan usaha mikro. Ketika anggota kesulitan mendapatkan dana untuk menjalankan usaha, PNM akan memberikan pinjaman modal perusahaan dan maju bersama untuk mengembangkan usaha. Dalam pembinaan permodalan pinjaman,

¹⁵ Oktarina Dwi Handayani, “Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Sebagai Salah Satu Sarana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan Pedesaan Menurut Pandangan Islam”, THE 1st UICIHSS, 365.

pembiayaan murabahah, wakalah dan wadiah digunakan untuk melaksanakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Dalam hal pengelolaan dana, koperasi ini berlandaskan hukum Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk memahami, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan program PNM Mekaar Syariah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya perempuan di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih. Selain itu, penulis ingin mengetahui gambaran umum implementasi pemberdayaan ekonomi perempuan oleh PNM Mekaar Syariah dalam perekonomian Negara Islam. Oleh karena itu penulis mencoba melakukan penelitian sebagai berikut: **“Analisis Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program PNM Mekaar Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih)”**.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan adalah masalah terbesar Negara Indonesia.
2. Kesenjangan sosial antara kelas menengah ke bawah dan kelas menengah atas terus berlanjut.
3. Ketidaksetaraan gender.
4. Tidak setaranya tingkat partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan.
5. Kurang aktifnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga.

6. Kesulitan akses modal sering melanda pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).
7. Implementasi pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program PNM Mekaar Syariah yang dilakukan di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih.
8. Program PNM Mekaar Syariah dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih.

Dalam penelitian ini, supaya masalah yang diteliti tidak terlalu meluas, jelas, dan terarah, maka peneliti membatasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program PNM Mekaar Syariah yang dilakukan di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih.
2. Program PNM Mekaar Syariah dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program PNM Mekaar Syariah yang dilakukan di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih ?
2. Bagaimana program PNM Mekaar Syariah dalam perspektif Ekonomi

Islam di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis menetapkan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program PNM Mekaar Syariah yang dilakukan di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih.
2. Untuk mengetahui program PNM Mekaar Syariah dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih.

F. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil dari masing-masing penelitian, dan hasil tersebut diharapkan dapat membawa manfaat bagi penelitian dan pihak lain yang membutuhkan. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Mampu menambah literatur atau referensi, serta menambah pemahaman ilmu ekonomi islam oleh penulis dan pembaca.
 - b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan para peneliti di bidang keilmuan yang memberdayakan perempuan secara ekonomi.
 - c. Dapat digunakan sebagai referensi atau perbandingan untuk penelitian lebih lanjut terkait topik penelitian (yaitu pemberdayaan ekonomi perempuan).
2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis, peningkatan pengetahuan dan pengalaman penelitian, khususnya pengetahuan dan pengalaman penelitian terkait dengan realisasi kekuatan ekonomi perempuan, harus diselaraskan dengan pengetahuan teoritis universitas.
- b. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang pengetahuan, materi informasi, dan penelitian ilmiah untuk mengkaji implementasi kekuatan ekonomi perempuan.
- c. Bagi lembaga yang diteliti dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan evaluasi pelaksanaan programnya pada kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan, dan disesuaikan dengan perspektif ekonomi Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, terdapat penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini sehingga dapat dijadikan acuan. Berikut beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini dijelaskan oleh peneliti :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nika Rizqi Fitriana dengan judul “Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil di Pedesaan (Studi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten

Grobogan)".¹⁶ Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan pemberdayaan perempuan di KUB Serang yaitu dengan memproduksi batik dalam bentuk lembaran serta melakukan inovasi produk. Faktor-faktor pendukung perempuan pada KUB Serang yaitu adanya motivasi perempuan, dukungan keluarga, serta dukungan pemerintah dalam menjalankan usaha bersama. Sedangkan faktor-faktor penghambat adalah kurangnya modal uang dan bahan baku, serta permintaan pasar yang masih tergantung di wilayah Kabupaten Grobogan. Peran anggota perempuan kelompok usaha bersama (KUB) sangat besar karena dapat memberikan peningkatan kesejahteraan keluarga. Anggota perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga setelah memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki penghasilan rutin setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2. Skripsi yang ditulis oleh Aswan Asqolani dengan judul “Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP- SPP) Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun”.¹⁷ Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga miskin setelah

¹⁶ Nika Rizqi Fitriana, “Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil di Pedesaan (Studi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)”, (Skripsi-- Universitas Negeri Semarang, 2016), 1

¹⁷ Aswan Asqolani, “Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP-SPP) Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun”, (Alumni Program IV Manajemen Pemerintahan Universitas Jambi)

menjadi pemanfaat dari bantuan dana bergulir simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP) PNPM Mandiri mengalami peningkatan dibandingkan rata-rata pendapatan rumah tangga miskin sebelum menjadipemanfaat. Jumlah masyarakat rumah tangga miskin tahun 2014 mengalami penurunan dibanding jumlah masyarakat rumah tangga miskin tahun 2013.

3. Jurnal yang ditulis oleh Ana Zahrotun Nihayah dengan judul “Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Poverty Reduction dalam Perspektif Ekonomi Islam”.¹⁸ Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh program simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil dan pengurangan kemiskinan. Sedangkan nilai-nilai ekonomi Islam pada program SPP PNPM Mandiri Perdesaan meliputi pemberian tenggang waktu pada nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran pinjaman, tidak memberikan denda pada nasabah yang membayar pokok dan jasa pinjaman meskipun tidak tepat waktu, menjalankan aktivitas sosial yakni pemberian sembako yang diberikan kepada fakir miskin dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

¹⁸ Ana Zahrotun Nihayah, “Pengaruh Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Poverty Reduction dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bangilan Tuban)”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2, (2015),

Penelitian merupakan tempat atau sarana untuk memperoleh data penelitian di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak warga Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih yang melakukan pinjaman modal komersial di PNM Mekaar Syariah untuk menjalankan usaha atau berbisnis, dan apakah akad simpan pinjam tersebut Islami, sehingga menarik Peneliti melakukan penelitian.

2. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Sedangkan dalam jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian yang dilihat dari segi tujuannya yaitu jenis penelitian studi lapangan atau *field research*¹⁹ Yang objeknya adalah penduduk khususnya perempuan di Desa Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih yang melakukan pinjaman modal komersial di PNM Mekaar Syariah. Adapun pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif, Nasution mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang memiliki sejumlah karakter yang memungkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dari observasi wawancara dan partisipasi langsung. Karena penelitian kualitatif adalah instrument dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan berkaitan dengan fenomena yang ditentukan langsung oleh peneliti pada saat melakukan sendiri kegiatan

¹⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI – Press, 2007, h. 9

penelitian di lapangan.²⁰ Karena hal demikian dirasa tepat untuk mendapatkan hasil yang sempurna dalam penelitian ini. Hal demikian sesuai dengan landasan dasar penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dalam oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²¹

3. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam bukunya Moleong mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan juga data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu informasi tentang wawancara, observasi dan pihak terkait lainnya (seperti peminjam modal komersial dan pimpinan cabang PNM).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang saling melengkapi yang

²⁰ S. Nasution, metode Research Penelitian Ilmiah, Bandung: Jemmers, 1982, h. 12-14.

²¹ Lexy, J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Rosda Karya, 2006, h.6.

diperoleh dari pihak lain, dan data sekunder dapat berupa dokumen dan literatur terkait masalah yang akan diteliti. Dalam data sekunder ini, peneliti menggunakan buku-buku yang berupa literatur untuk membahas pemberdayaan, ekonomi Islam dan metode penelitian. Selain itu, data tentang sejarah, visi, misi, tujuan, dan struktur organisasi diperoleh melalui PNM Mekaar Syariah.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data, diantaranya: diantaranya adalah:

a. Observasi

Observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.²² Penelitian ini observasi akan dilakukan dengan cara peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memahami bagaimana peminjam modal komersial dapat melaksanakan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui PNM Mekaar Syariah di Desa Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih. Selain itu observasi bertujuan untuk mencocokkan hasil wawancara dengan fakta yang ada. Pengamatan ini bersifat formal atau informal. Metode ini dapat memandu peneliti untuk memperoleh pengetahuan sebanyak- banyaknya terkait pertanyaan

²² Moh Nazir, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia. 2005, h. 175.

penelitian. Dalam hal ini peneliti berperan sebagai pengamat yang berperan sebagai pengamat secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²³ Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Ini disebabkan oleh karena peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipasi. Pertanyaan sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta dan realita. Dengan mengajukan pertanyaan peneliti masuk dalam alam berpikir orang lain, mendapatkan apa yang ada dalam pikiran mereka dan mengerti apa yang mereka pikirkan. Karena persepsi, perasaan, pikiran orang sangat berarti dapat dipahami dan dapat dieksplisitkan dan dianalisis secara ilmiah. Dalam wawancara peneliti bukan hanya mengajukan pertanyaan, tetapi mendapatkan pengertian tentang pengalaman hidup orang lain. Dalam hal ini hanya dapat diperoleh dengan *indepth interview*. Dengan wawancara yang mendalam

²³ Lexi J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, h. 231.

peneliti akan menangkap arti yang diberikan partisipan pada pengalamannya. Pengalaman dan pendapat inilah yang menjadi bahan dasar data yang nantinya dianalisis.²⁴

Dalam metode wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara kepada ibu-ibu peminjam modal komersial PNM Mekaar Syariah sehingga menghasilkan wawancara yang akurat. Penelitian akan menggunakan jenis wawancara *semiterstruktur* dimana penelitian telah mempersiapkan beberapa pertanyaan umum yang relevan dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara.²⁵

Tujuan penelitian menggunakan metode ini adalah untuk menemukan masalah secara lebih terbuka, dimana responden ditanyakan pendapat dan idenya.

c. Dokumentasi

Dalam dokumentasi yang disusun peneliti dengan mengumpulkan berbagai informasi, pengetahuan, fakta dan data sehingga dapat mengumpulkan data klasifikasi. klasifikasi dari bahan tertulis terkait pertanyaan penelitian dari sumber dokumentasi yang diperoleh selama penelitian di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

²⁴ Raco, Metode ..., h.116-117

²⁵ Moleong, Metodologi ..., h. 233.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁶ Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah peminjam modal komersial yang dipinjam melalui PNM Mekaar Syariah di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih. Jumlah populasi keseluruhan penelitian ini adalah 100 orang peminjam.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Bahwa teknik *Purposive Sampling* merupakan Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel.²⁷ Kriteria pemilihan sampel penelitian ini peminjam dana komersial yang digunakan untuk modal usaha. Karena tidak semua penduduk perempuan di Desa Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih yang melakukan pinjaman untuk modal usaha, maka populasi penelitian ini berjumlah 100 orang diambil 30%. Maka pembagian sampelnya yaitu $100 \times 30\% = 30$. Jadi sampel penelitian ini adalah 30 orang peminjam modal komersial diambil dari populasi yang ada.

²⁶ Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). h. 79.

²⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2017). h. 119.

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Analisis data adalah mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara, observasi, dan menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapatan, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau findings. Findings dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menentukan tema, pola, konsep, insights dan understanding. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara Deskripsi Kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian yang memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan segala sesuatu secara objektif.²⁸ Sedangkan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau perilaku orang-orang yang diamati.²⁹ Penelitian ini bersifat Deskripsi Analisis untuk menggambarkan tentang implementasi pemberdayaan ekonomi perempuan yang penulis peroleh dari peminjam modal komersial PNM Mekaar Syariah yang ada di Desa Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih. Analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan, menyusun dan menjelaskan data yang sudah diperoleh secara menyeluruh dari lapangan, baik data yang diperoleh tersebut berasal dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun bahan yang lainnya secara sistematis. Dalam metode penelitian ini, peneliti

²⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h. 49.

²⁹ *Ibid.*, h. 11

menggunakan teknik analisis data dengan tiga teknik analisis data antara lain:³⁰

1. Reduksi Data

Reduksi data digunakan untuk merangkum, memilih hal-hal yang utama, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta membuang data-data yang tidak diperlukan dalam penelitian.³¹ Data yang direduksi dari penelitian ini adalah data dari transkrip, wawancara peneliti dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu 30 peminjam modal komersial di PNM Mekaar Syariah. Kemudian, peneliti akan mengumpulkan dan menyusun jawaban dari narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dari penelitian ini.

2. Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti memberikan data hasil reduksi. Data yang disajikan merupakan deskripsi dari hasil wawancara antara peneliti dengan narasumber yaitu 30 peminjam modal komersial PNM Mekaar Syariah, kemudian penulis dapat menyajikan data dalam bentuk teks naratif dan tabel.

3. Penarikan Kesimpulan

Pemahaman yang lebih jelas tentang gambaran kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program PNM Mekaar Syariah dapat disimpulkan dalam studi kualitatif ini.

³⁰ Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 209.

³¹ Ibid, 248.

I. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan pada penelitian merujuk pada pedoman penulisan skripsi kualitatif program sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020. Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri dari lima bab. Setiap bab diuraikan beberapa sub bab yang menjadi penjelasan rinci dari pokok pembahasan. Berikut adalah sistematika penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN.

Pada bab ini memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI.

Pada bab ini memuat tentang teori-teori yang digunakan berkaitan dengan penelitian meliputi teori pemberdayaan ekonomi perempuan, PNM Mekaar Syariah, teori murabahah, teori wakalah, teori wadi'ah, teori mudharabah, dan teori ekonomi Islam.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum objek penelitian dan deskripsi data secara lengkap mengenai data yang diperoleh di lapangan. Meliputi profil PNM Mekaar Syariah dan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program PNM.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN.

Pada bab ini memuat tentang hasil analisa data sebagai jawaban dari

rumusan masalah yaitu implementasi pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program PNM Mekaar Syariah yang dilakukan di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih dan tinjauan ekonomi Islam mengenai program PNM Mekaar Syariah.

BAB V PENUTUP.

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Istilah pemberdayaan dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, berasal dari kata “daya” yang artinya kemampuan untuk bertindak atau berbuat sesuatu, mendayagunakan berarti berusaha untuk mendapatkan suatu hasil perubahan.³²

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), arti dari kebebasan ini tidak hanya bebas mengemukakan pendapat, namun juga bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b. Memungkinkan masyarakat untuk menjangkau sumber-sumber produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-

³² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2015), 324.

keputusan yang berpengaruh pada masyarakat.³³

Sedangkan, pengertian dari pemberdayaan masyarakat adalah sebuah perwujudan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam hal ini, pemberdayaan merupakan sebuah solusi yang terbaik untuk meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan partisipasi aktif dan kreatif guna mencapai tujuan perubahan sosial masyarakat.³⁴

Pemberdayaan masyarakat menurut Gunawan Sumodiningrat yang dikutip oleh Siti Muflihah Alwan adalah sebuah upaya untuk memandirikan masyarakat dengan cara mewujudkan potensi skill atau kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Adapun pemberdayaan masyarakat seringkali melekat pada dua kelompok yang saling berkaitan, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.³⁵ Terdapat beberapa upaya dalam teori Gunawan Sumodiningrat yang dikutip oleh Agus Purbathin Hadi untuk memberdayakan masyarakat (*empowering*) melalui pengkajian dari 3 (tiga) aspek:³⁶ *Pertama, Enabling* yakni

³³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 58.

³⁴ Abdul Basith, *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, (Malang: UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI), 2012), 27.

³⁵ Siti Muflihah Alwan, "Kontribusi BMT Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi pada BMT Wilayah Tangerang Selatan)", (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 25.

³⁶ Agus Purbathin Hadi, "Konsep Pemberdayaan, Partisipasi, dan Kelembagaan dalam Pembangunan", *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*, 2.

menciptakan suasana yang kemungkinan memberikan potensi masyarakat untuk berkembang. *Kedua, Empowering* ialah memperkuat potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat melalui langkah-langkah nyata untuk membuat masyarakat semakin berdaya dengan melibatkan penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang. *Ketiga, Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengalaman demokrasi dimana hal ini merupakan suatu unsur penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dari beberapa teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pemberdayaan ekonomi adalah sebuah usaha atau cara oleh individu atau kelompok golongan lemah untuk mendapatkan kekuatan berupa materiil ataupun non materiil untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan diarahkan agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dalam upaya meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah perlu adanya akses yang terdiri dari empat hal antara lain: akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap permintaan.

2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan penerjemahan dari istilah *women empowerment* yang muncul dalam diskursus gender. Istilah ini muncul dikarenakan adanya keprihatinan kepada kaum perempuan yang telah terdiskriminasi oleh kaum laki-laki. Pemberdayaan perempuan menjadi penting dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain: kaum perempuan tidak dapat mengekspresikan kebebasan yang dimilikinya, tingkat pendidikan kaum perempuan cenderung lebih rendah daripada kaum laki-laki, hak reproduksi yang cenderung dipaksakan, serta kaum perempuan tertinggal dalam dunia politik. Maka dari itu, agar semuanya berjalan dengan seimbang maka diperlukannya upaya untuk melakukan kegiatan pemberdayaan agar kaum perempuan memiliki aspek kontrol dalam segala aspek pembangunan. Yang dapat kita ketahui bahwa tujuan akhir dari pemberdayaan perempuan ini adalah kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.³⁷

Sementara itu, pemberdayaan perempuan menurut Karl yang dikutip oleh Siti Hasanah merupakan suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar untuk mendapatkan kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan transformasi (*transformation action*) agar perempuan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.³⁸ Kaum

³⁷ Minarti, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Ketrampilan Menjahit oleh Koperasi Wanita Wira Usaha Bina Sejahtera di Bulak Timur-Depok", (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 34-35.

³⁸ Siti Hasanah, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan

perempuan memiliki kemandirian apabila mempunyai pendapatan dan kegiatan ekonomi. Pendapatan menjadi faktor penting untuk kaum perempuan agar memiliki kekuatan dalam posisi tawar dalam setiap pengambilan keputusan di rumah tangga dan di luar rumah tangga termasuk keputusan terkait dengan nasib perempuan itu sendiri. Pemberdayaan ekonomi perempuan sangat berkaitan dengan model grameen bank. Bank Grameen dikenal sebagai organisasi kredit mikro yang didirikan di Bangladesh dimana bank ini memberikan pinjaman kecil kepada masyarakat golongan lemah tanpa membutuhkan jaminan. Sistem ini didasari dengan ide yang mengatakan orang miskin yang kurang menggunakan kemampuannya dalam segala bidang. Sistem kredit dalam bank grameen adalah memberikan pinjaman yang diberikan kelompok perempuan produktif yang tergolong dalam status sosial keluarga miskin.³⁹

Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pemberdayaan ekonomi perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar untuk mendapatkan kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan transformasi (*transformation action*) agar perempuan memiliki kemandirian di rumah tangga maupun diluar rumah tangga dan turut andil dalam kegiatan

(Simpan Pinjam Syariah Perempuan), SAWWA, Volume 9, Nomor 1, (Oktober 2013), 76.

³⁹ Siti Rohmah, "Pengaruh Penyaluran Pembiayaan BMT Al-Jibaal dan BMT Mekar Dakwah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan". (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 22.

ekonomi.

3. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dalam Perspektif Islam

Pemberdayaan kaum perempuan merupakan usaha untuk memperbesar akses dan kontrol perempuan pada bidang sumber daya ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pengusaha mikro bukan hanya untuk mempertahankan kelangsungan usaha demi memenuhi kebutuhan keluarganya dan permasalahan gender, akan tetapi juga berupaya untuk mengurangi kemiskinan di negara ini.⁴⁰

Dalam Islam khususnya Al-Qur'an dan Sunnah telah banyak membicarakan tentang kaum perempuan. Allah telah memberikan kedudukan yang sama antara kaum laki-laki dan perempuan yang mana keduanya adalah sesama ciptaan-Nya. Allah telah mengisyaratkan bahwa perempuan dapat menerima bagian sesuai prestasinya, hal ini terkandung dalam firman-Nya pada QS. An-Nisa':32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: *Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah*

⁴⁰ Abdurraafi' Maududi Dermawan, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Kreatif", *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anarki*, 164.

*Maha Mengetahui segala sesuatu.*⁴¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan juga memiliki kemampuan (potensi) dan eksistensi yang setara dengan kaum laki-laki, baik dari potensi sosial maupun ekonomi. Dalam Islam mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan sendiri telah dicontohkan oleh Siti Khadijah istri dari Rasulullah SAW, yang pada saat itu menjadi saudagar kaya dari hasil menjadi seorang pedagang. Bahkan Rasulullah sendiri kala itu pernah menjadi seorang agen yang menjual barang dagangan Siti Khadijah. Hal ini menjadi pembuktian bahwa tidak ada perbedaan gender dalam kegiatan perekonomian, hal ini dikarenakan setiap makhluk berusaha untuk mendapat perubahan dalam hidupnya.⁴²

Adib Susilo menyatakan bahwa pemberdayaan Islam berdasarkan pada keadilan, kesamaan, partisipasi, penghargaan, dan ta'awun (tolong menolong) melalui pendekatan dengan cara pemberian bantuan langsung, sarana prasarana dan memberi pertolongan secara kontinu melalui pengembangan skill.⁴³

Diantara asas-asas di atas terdapat kaitan yang sangat erat antara satu sama lain dimana akan dijelaskan lebih spesifik sebagai berikut:

a. Prinsip Al-'Adl (Keadilan)

Kata keadilan di dalam al-Qur'an disebutkan terbanyak setelah

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Wali Oasis Terrace Recident, 2010), 83.

⁴² Siti Muflihah Alwan, "Kontribusi BMT Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi pada BMT Wilayah Tangerang Selatan)", (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 26.

⁴³ Adib Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam", *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 02 (Agustus 2016), 206.

kata Allah dan 'Ilm. Hal ini menunjukkan bahwa betapa besar bobotnya dalam Islam. Keadilan berarti kebebasan bersyarat akhlak Islam yang diartikan dengan kebebasan yang tidak terbatas, akan menghancurkan tatanan sosial dalam pemberdayaan manusia.⁴⁴ Dijelaskan dalam QS. Al-Hadid ayat 25 mengenai asas al-'adl sebagai berikut :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

*Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.*⁴⁵

Dari penafsiran ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut sebagai dasar untuk mengatur dan membina masyarakat, maka setiap agama yang dibawa oleh para rasul memiliki asas keadilan. Keadilan wajib ditegakkan oleh para rasul serta pengikut-pengikutnya dalam kehidupan masyarakat. Keadilan dapat berwujud pada keadilan penguasa terhadap rakyatnya, keadilan suami sebagai

⁴⁴ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 80-82.

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Wali Oasis Terrace Recident, 2010), 537

kepala rumah tangga, keadilan pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Sehingga dalam hal ini, seluruh anggota masyarakat akan sama kedudukannya dalam hukum, sikap, dan perlakuan.

b. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan merupakan prinsip yang berdiri di atas dasar akidah yang sama sebagai buah dari prinsip keadilan. Islam memandang setiap manusia secara individu, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam suatu negara. Semua manusia dimata Allah SWT, memiliki kedudukan sama yaitu sebagai hamba Allah, dan tidak ada perbedaan dalam hak dan kewajiban. Karena hal ini seluruh kebutuhan dasar manusia sudah diatur secara menyeluruh, sehingga setiap individu kemungkinan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier yang disesuaikan dengan kadar kesanggupannya. Dalam prinsip persamaan ini tidak ada perbedaan yang besar antara yang satu dengan yang lain, hanya saja yang membedakan adalah kemampuan, bakat, amal, dan yang menjadi tuntutan pekerjaan dan perbedaan profesi.⁴⁶

c. Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi merupakan komponen utama dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berkelanjutan. Dalam prinsip partisipasi melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dan

⁴⁶ Adib Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam...", 204.

aktif sebagai penjamin dalam pengambilan keputusan bersama untuk suatu pembangunan baik dalam diri, kehidupan, dan lingkungan.⁴⁷

Pemberdayaan masyarakat dalam Islam harus senantiasa mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk selalu terlibat dalam proses pembangunan yang dapat berlangsung secara dinamis. Sehingga dalam hal ini, masyarakat akan mudah menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan mampu mengambil keputusan secara bebas dan mandiri. Prinsip partisipasi sendiri sudah ditanamkan dengan baik kepada masyarakat muslim di zaman Rasulullah yang berdampak sangat baik dan berkesinambungan pemberdayaan diantara masyarakat pada saat itu⁴⁸

d. Prinsip Penghargaan Terhadap Etos Kerja

Dalam istilah, pengertian etos adalah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan yang bersifat khusus mengenai individu atau masyarakat. Sedangkan istilah kerja merupakan segala bentuk amalan/pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat. Sementara itu, etos kerja Islami merupakan suatu hasil kepercayaan seorang muslim mengenai pekerjaan itu berkaitan dengan tujuan hidupnya. Dalam ajaran Islam sendiri, bertujuan untuk mendorong umatnya untuk bekerja keras dan menumbuhkan budaya dan etos kerja yang tinggi. Sehingga dalam hal

⁴⁷ Agus Purbathin Hadi, "Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan dalam Pembangunan", *Jurnal Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*, (2009), 5.

⁴⁸ Adib Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam...", 205.

ini, pemberdayaan diperlukan untuk mengembangkan kemampuan manusia agar menjadi lebih mandiri.⁴⁹

e. Prinsip Tolong Menolong (Ta' awun)

Dalam Islam, prinsip tolong menolong yaitu memberikan suatu penyelesaian yang praktis terhadap masalah ekonomi modern dengan mengubah sifat masyarakat yang awalnya mementingkan diri sendiri menjadi memiliki sifat tolong menolong. Hal ini dikarenakan, setiap individu didorong untuk bekerja bersama-sama dalam menyusun suatu sistem ekonomi berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan sehingga membentuk prinsip tolong menolong. Pemberdayaan masyarakat akan menyebar lebih luas ketika individu berguna bagi semua pihak.⁵⁰

Dalam Islam, pemberdayaan ekonomi perempuan ditujukan untuk memuliakan kedudukan perempuan sesuai proporsi dan kemampuan ekonomi perempuan dan menjadikan kaum perempuan sebagai saudara kandung bagi kaum lelaki. Dalam Islam juga mengakui kemampuan sosial perempuan dan kemampuan beribadah secara *taklif shar'i*, sehingga kaum perempuan mampu berperan dalam kehidupan bermasyarakat.⁵¹

Pemberdayaan ekonomi umat bagi perempuan juga dapat dilakukan dengan pemberdayaan industri dan usaha kecil. Dalam

⁴⁹ Ibid, 205.

⁵⁰ Ibid.,208

⁵¹ Siti Rohmah, "Pengaruh Penyaluran Pembiayaan BMT Al-Jibaal dan BMT Mekar Dakwah ..., 24.

konteks pemberdayaan ekonomi umat memberdayakan perempuan melalui pengembangan industri dan usaha kecil dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. peningkatan akses dana bagi industri kecil untuk kegiatan produksi.

Akses pembiayaan yang memadai dari lembaga keuangan dapat menciptakan modal bagi usaha industri dan pengusaha kecil. Dalam kegiatan penyaluran dapat berbentuk pembiayaan dan pembinaan dana berupa alat produksi yang dilakukan.

2. memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat.

Dengan kata lain, pengusaha-pengusaha besar harus selalu membantu memperlancar usaha kecil baik dari segi manajemen maupun dari segi penyaluran hasil produksinya. Hal ini dikarenakan antara usaha besar dan usaha kecil itu saling bekerja sama untuk memperkuat perekonomian Negara.

3. harus adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang rakyat, sehingga usaha kecil tidak semakin surut akibat terdapatnya memadai untuk melindungi dan mendukung pembangunan ekonomi usaha besar.⁵²

4. Indikator Dampak Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Pemberdayaan merupakan upaya untuk mengurangi kemiskinan guna mencapai kesejahteraan melalui penguasaan beberapa faktor produksi. Pemberdayaan bukan hanya berdampak pada kualitas dan

⁵² Ridwan Mas'ud, Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi ..*, 126.

kapabilitas (kemampuan) SDM, tetapi juga meningkatkan tabungan, produksi, konsumsi, investasi, dan keberlangsungan lembaga koperasi itu sendiri.⁵³

Berikut adalah dampak pola Grameen Bank terhadap pemberdayaan ekonomi Anggota koperasi dan Lembaga Koperasi:

a. Peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM

1. Adanya peningkatan jumlah anggota yang mendapatkan akses layanan keuangan.
2. Peningkatan jumlah anggota yang mampu mengelola keuangan dengan baik setelah adanya pembiayaan.
3. Peningkatan jumlah anggota koperasi yang memiliki usaha mikro dan mampu mengembangkan usaha mikro.

b. Pendapatan

1. Adanya peningkatan rata-rata rumah tangga.
2. Adanya peningkatan pendapatan hasil usaha mikro setelah adanya pembiayaan.

c. Tabungan

1. Peningkatan jumlah tabungan anggota.
2. Peningkatan jumlah, jenis, dan nilai aset yang dimiliki oleh anggota.
3. Peningkatan investasi selain tabungan yang dimiliki oleh anggota.

d. Konsumsi

⁵³ Siti Rohmah, "Pengaruh Penyaluran Pembiayaan BMT Al-Jibaal dan BMT Mekar Dakwah ..., 23.

1. Peningkatan jumlah konsumsi rumah tangga anggota koperasi.
2. Peningkatan jenis dan kualitas rumah tangga anggota koperasi.

e. Produksi

1. Peningkatan jumlah modal dan laba usaha.
2. Peningkatan volume produksi dan nilai penjualan.
3. Peningkatan jenis dan ragam usaha.⁵⁴

5. Strategi Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan dilakukan agar menciptakan kondisi masyarakat yang dapat meraih keberdayaan. Strategi pemberdayaan menurut Jim Ife yang dikutip oleh Zainal Kurniawan Arif adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan (*policy and planning*).
- b. Pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik (*social and political action*).
- c. Pemberdayaan melalui peningkatan kesadaran dan pendidikan (*education and consciousness raising*).⁵⁵

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan tiga tahap strategi antara lain: pertama, merekonstruksi tahap etika psikologis dari nilai pasif ke nilai aktif terhadap masyarakat akar rumput mengenai kemiskinan. Jadi masyarakat yang kurang terberdayakan diberi

⁵⁴ Ibid.,

⁵⁵ Zainal Kurniawan Arif, "Penerapan Islamic *Empowerment* Melalui Program Pembiayaan Modal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Nurul Jannah Gresik", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 49.

penjelasan, agar masyarakat dapat menarik minat, mencoba dan mempertimbangkan bahwa kemiskinan bukanlah suatu takdir bawaan dan pasrah akan keadaan sehingga tidak menghasilkan perubahan. Kedua, mengadakan upaya perubahan tingkah laku terhadap fakir miskin yang sudah sadar dan bersemangat tadi, dengan pendidikan keterampilan, meningkatkan kemampuan manajerial, pengetahuan melalui pelatihan, penyuluhan, pendampingan, dan pengembangan teknologi informasi. Ketiga, yaitu mengupayakan perubahan status melalui perwujudan komitmen kemitraan dan suntikan dana seperti modal usaha secara struktural, setelah strategi pertama dan kedua dilakukan.

B. PNM Mekaar Syariah

1. Pengertian PNM Mekaar Syariah

PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro, melalui :

1. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga;
2. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan;
3. Pembiasaan budaya menabung;
4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

Program Mekaar Syariah dilaksanakan melalui indoktrinasi usaha sesuai syariat Islam yaitu :

1. Pertemuan mingguan yang wajib dilakukan secara disiplin dan tepat waktu dengan mengucapkan doa, janji nasabah, janji account officer mekaar syariah, janji bersama.
2. Nasabah Mekaar syariah adalah mereka yang telah mempunyai usaha, atau akan melakukan usaha, atau yang pernah usaha karena sudah mempunyai pengalaman usaha sebelumnya sesuai syariat islam.
3. Nasabah wajib memiliki usaha setelah diberikan pembiayaan.
4. Dari penerima sedekah menjadi pemberi sedekah.⁵⁶

2. Akad dalam PNM Mekaar Syariah

1. Murabahah

Perjanjian jual-beli antara Mekaar syariah / pemberi pembiayaan dengan nasabah. Mekaar syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Mekaar syariah dan nasabah.⁵⁷

- Definisi Murabahah

Murabahah berasal dari kata Rabh, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Muhammad Ayub mendefenisikan dalam murabahah penjualan harus mengungkapkan biaya dan kontrak (Akad

⁵⁶ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>.

⁵⁷ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>.

) terjadi dengan margin keuntungan yang disetujui. Sejalan dengan itu, Rivai dan Andria Permata Veithzal, mengartikan Murabahah sebagai suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjualan dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.⁵⁸ Boleh dikatakan bahwa akad yang terjadi dalam murabahah ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts. Karena dalam murabahah ditentukan keuntungannya.⁵⁹

Adiwarman A. Karim menjelaskan tentang salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syari'ah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh rasulullah saw. Dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.⁶⁰ Amir Machmud Dan Rukmana sependapat dengan Adiwarman Karim akan tetapi penjual harus member tahu harga yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai

⁵⁸ Veithzal Rivai dan Andria permata Veithzal, *Islamic Finansial Management*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), Ed. I, Cet. I, h. 145.

⁵⁹ Nurul Huda dan Muhammad heykal, *lembaga keuangan islam :tinjauan teoritis dan Praktis*, (Jakarta :kencana, 2010), Ed. Ke-I, h. 43.

⁶⁰ Adiwarman A . Karim , *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2011), h . 113.

tambahannya.⁶¹

- Dasar Hukum Murabahah

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tentunya mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Pada umumnya Pembiayaan *murabahah* dasar yang digunakan berasal dari surat-surat dalam kitab suci al-Qur'an, al-Hadis dan Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dasar hukum pelaksanaan murabahah dalam sumber utama hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran

Al-baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat

⁶¹ Amir Machmud Dan Rukmana , *Bank Syari'ah teori , kebijakan , dan studi empiris di Indonesia* ,(Jakarta: Erlangga , 2010), h. 27.

peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁶²

Serta terdapat dalam surat an-Nisaa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.⁶³

2. Hadist

Landasan hadist yang mendasari transaksi murabahah ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. 2289.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى
أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن
صهيب

“*Diriwayatkan dari shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual*

⁶² Agus Hidayatulloh, *al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Perkata*, (Bekasi: CiptaBagus Segara, 2012), h. 47

⁶³ *Ibid*, h. 83

beli secara tidak tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”

Hadist dia atas menjelaskan diperbolehkannya praktek jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.

3. Ijma

Mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan cara *murabahah*, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain.⁶⁴

Imam Syafi'i tanpa bermaksud untuk membela pandangannya mengatakan jika seseorang ,menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, “kamu beli untukku, aku akan berikan keuntungan bagini, bagini’,kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah.

Imam malik mendukung pendapatnya dengan acuan pada praktek orang- orang madinah,yaitu ada consensus pendapat di madinah mengenai hokum orang yang membeli baju disebuah kota, dan mengambilnya kekoa lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan.

⁶⁴ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: uii press, 2005), h.47.

- Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi ada beberapa yaitu:

1. Penjual (ba'i) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual.
2. Pembeli (musytari) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.⁶⁵ (Dalam hal ini pihak harus memenuhi kriteria bahwa pihak tersebut cakap hukum, sukarela dalam pengertian tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/di bawah tekanan).
3. Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga).

Harga dalam hal ini pun sudah harus jelas berapa jumlahnya.

Harga inilah yang akan ditambahkan margin oleh Bank Syariah yang akan disepakati oleh pihak nasabah. Bank Syariah berperan sebagai pembeli dari pihak penjual.⁶⁶ Objek tersebut ber kriteria :

- a. Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang.
- b. Bermanfaat.
- c. Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
- d. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
- e. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dengan yang diterima pembeli.

4. Shighah, yaitu Ijab (serah) dan Qabul (terima)

Akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara ijab dan qabul harus selaras baik spesifikasi

⁶⁵ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm.88.

⁶⁶ *Ibid*, h. 83

barang maupun harga dari objek tersebut, tidak menggantungkan pada klausul yang baru akan terjadi padahal/kejadian yang akan datang.⁶⁷ Adapun syarat murabahah antara lain:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.⁶⁸



- Jenis-Jenis Murabahah

1. Murabahah dengan Pesanan (*murabahah to the purchase order*)

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan setelah pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan

⁶⁷ *Ibid*, h. 85

⁶⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 102

mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

2. Murabahah Sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga yang sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.⁶⁹

2. Wakalah

Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini Mekaar Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkan.⁷⁰

1. Definisi Wakalah

Wakalah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa, diantaranya adalah perlindungan (*al-hifz*), penyerahan (*at-tafwid*), atau memberikan kuasa. Menurut kalangan Syafi'iyah pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wākil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa di gantikan (*an-naqbalu an-niyabah*) dan dapat di lakukan oleh pemberi kuasa. Dengan ketentuan pekerjaan

⁶⁹ Ascaria, *Akad dan produk bank syariah*, (Jakarta:PT, Raja Grafindo Persada.h.89.

⁷⁰ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>.

tersebut di laksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.⁷¹

Wakalah berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan *wakil*⁷². *Al-wakalah* juga memiliki arti *At-Tafwid* yang artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.⁷³ Sehingga *Wakalah* dapat diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti, kepada orang lain, agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.⁷⁴

Al-wakalah dalam pengertian lain yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak ke dua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang di berikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa itu telah di laksanakan sesuai yang di syatkan atau yang telah di tentukan maka semua resiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.⁷⁵

Manusia tidak mungkin bisa melakukan semua pekerjaan

⁷¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, Cet. III, 2002), 20.

⁷² Ahmad Warson Munawwir, *Al- Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1579.

⁷³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2008), 120-121.

⁷⁴ Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam* (Surabaya: Karya Abbditama, 1995), 163.

⁷⁵ Rhesa Yogaswara, "Konsep Wakalah dalam Fiqh Muamalah" dalam <http://viewIslam.wordpress.com/2009/04/16/konsep>

sendirian, semua orang pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam mengerjakan urusannya baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti mewākilkan dalam pembelian barang ,pengiriman uang, pengiriman barang, pembayaran utang, penagihan utang dan lain sebagainya.

Wakalah dalam praktek pengiriman barang terjadi ketika atau menunjuk orang lain atau untuk mewākili dirinya mengirimkan sesuatu. Orang yang di minta di wakikan harus menyerahkan barang yang akan dia kirimkan untuk untuk orang lain kepada yang mewakili dalam suatu kontrak.

Penerima kuasa (wākil) boleh menerima komisi (al-ujur)⁷⁶ dan boleh tidak menerima komisi (hanya mengharapkan ridho Allah/ tolong menolong). Tetapi bila ada komisi atau upah maka akad nya seperti akad ijarah/ sewa menyewa. Wakalah dengan imbalan di sebut dengan wakalah bil -ujrah,bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *al-wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dan perwakilan berlaku selama yang mewakikan masih hidup.⁷⁷

2. Dasar Hukum Wakalah

⁷⁶ Wirdiyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, cet. I, 2005), 121.

⁷⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 231- 233.

Dasar hukum dari *wakalah* adalah boleh dilakukan dalam ikatan kontrak yang di syariatkan dengan dasar hukum *ibahah* (di perbolehkan) , *al-wakalah* bisa menjadi sunnah, makruh, haram, atau bahkan wajib sesuai dengan niat pemberi kuasa, pekerjaan yang di kuasakan atau faktor lain yang mendasarinya dan mengikutinya.

Para imam mazhab sepakat bahwa perwakilan dalam akad (kontrak, perjanjian, transaksi) yang dapat digantikan orang lain untuk melakukannya adalah dibolehkan selama dipenuhi rukun-rukunnya. Tiap- tiap hal boleh dilakukan penggantian, selama hal tersebut bukanlah hal yang menyangkut ibadah yang bersifat badaniah seperti sholat, puasa, dan lainnya tidak dapat diwakilkan. Sedangkan yang boleh dilakukan penggantian adalah pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, seperti jual-beli, persewaan, pembayaran utang, menyuruh menuntut hak dan menikahkan maka hukumnya sah memberi *wikalah*.

Al- wakalah merupakan jenis kontrak *jā'iz min aṭrafayn*, yaitu kedua belah pihak boleh dan berhak membatalkan ikatan kontrak kapanpun mereka menghendaki. Pemberi kuasa (*al-muwakkil*) berhak mencabut kuasa dan menghentikan penerima kuasa (*al-wākil*) dari pekerjaan yang di kuasakan. Begitu pula sebaliknya bagi penerima kuasa (*al-wākil*) berhak membatalkan dan mengundurkan diri dari kesanggupan nya menerima kuasa.

Al-wakalah ditetapkan dalam syariah berdasarkan beberapa macam dalil, sunah dan ijma, antara lain :

a. *Al-Quran*

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.*⁷⁸

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا لَهُمْ لَيِّسَاءً لَوْ بَيَّنَّهُمْ قَالِ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?).” mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamuberada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Jamunu, 1967), 123.

Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah- lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.⁷⁹

b. Hadist

Selain telah banyak disebutkan dalam Al- Qur‘an, banyak hadis nabi yang juga melandaskan wakalah, seperti dalam Hadis mengatakan :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْفُوتِهِ

“Dari Jabir r.a ia berkata: aku keluar pergi ke khaibar lalu aku datang kepada Rasulullah Saw maka beliau bersabda: bila engkau datang pada wakilku, maka ambillah darinya 15 wasaq (HR. AbuDawud).⁸⁰

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya* (Jakarta: Jamunu, 1967), 132.

⁸⁰ *Ibid.*, 445.

kandang hewan dan lain- lain.⁸¹

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ:
اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُ
إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا
أُعْطَيْتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا
مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُنْ وَتَصَدَّقْ. (متفق عليه؛ نيل
الأوطار للشوكاني، [القاهرة: دار الحديث

“Diriwayatkan dari Busr bin Sa’id bahwa Ibn Sa’diy

*al- Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untu
mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya
menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar
saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya
karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang kamu
beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul,
lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa
yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya:
Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah
(terimalah) dan bersedekahlah.” (Muttafaq „alaih).⁸²*

c. Ijma

Para ulama bersepakat dengan ijma” atas
diperbolehkannya wakalah. Bahkan mereka cenderung

⁸¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2001), 121.

⁸² Muttafaq „alaih. Al-Syaukani, *Nail al-Auṭar*, juz 4 (Kairo: Dar al-Hadīṣ, 2000), 527.

mensunahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah merupakan termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh al quran dan di sunnahkan oleh rasullullah SAW. Allah berfirman

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran..." (QS. Al-Maidah: 2).

Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis dibawah ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَفْسٍ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفْسَ اللَّهِ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: Telah menceritakan pada kami Yahya bin Yahya

At- Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al- A"la Al- Hamdani dan lafaz ini milik Yahya dia berkata: telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al- A"masyi dari

*Abu Ṣalih dai Abu Hurairah di berkata: Rasulullah Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda: barang siapa membebaskan mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebakannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim” (HR. Muslim no.4867).*⁸³

3. Rukun dan Syarat Wakalah

Menurut kelompok Hanafiah, rukun wakalah itu hanya ijab qabul, akan tetapi jumhur ulama tidak memiliki pendapat yang serupa, mereka berpendirian bahwa rukun dan syarat wakalah Sekurang-kurangnya terdapat empat rukun yaitu pihak pemberi kuasa (*muwakkil*), pihak penerima kuasa (*wākil*), obyek yang dikuasakan (*tawkil*) dan ijab qabul (*sigat*). Keempatnya dijelaskan sebagai berikut :⁸⁴

1. Orang Yang Mewakikan (al-muwakkil)

- Seseorang yang mewākikan atau pemberi kuasa harus yang memiliki hak atau mempunyai wewenang untuk bertasharruf pada bidang-bidang sesuatu yang di wākilkannya. Karena itu

⁸³ Imam Muslim, *Ṣahih Muslim* (Beirut Libanon: Daar al- Kutub, t. th.), 112

⁸⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 234-235.

seseorang tidak sah jika mewākilkan sesuatu yang bukan hak nya.

- Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang di kuasakannya.
- pemberi kuasa sudah cakap bertindak atau mukallaf.

2. Orang Yang diwakilkan (al-wakil)

- Penerimaan kuasa harus memiliki kecakapan akan suatu aturan yang mengatur proses akad wakalah, sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat yang di wakikan.
- penerima kuasa adalah orang yang bisa menjaga amanah yang di berikan oleh pemberi kuasa. Ini berarti bahwa *Al-wakil* tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang di luar batas, kecuali karena kesengajaannya.

3. Objek Yang diwakilkan

- Objek harus berbentuk pekerjaan yang pada saat dikuasakan adalah merupakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan pemberi kuasa (*al-muwakkil*). Sehingga tidak sah mewakilkan suatu pekerjaan yang bukan hak nya.
- Pekerjaan yang dikuasakan harus jelas spesifikasi dan kriterianya, meskipun hanya dari satu tinjauan. Hukumnya sah mengatakan, "Aku mewakilkanmu untuk mengirimkan barang", meskipun *al- wākil* tidak tahu barang yang mana ataupun barang apa yang harus dia kirimkan.

- Objek harus dari jenis pekerjaan yang boleh dikuasakan pada orang lain. Sehingga ulama berpendapat, tidak sah menguasai sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah murni, seperti shalat dan puasa. Namun boleh menguasai ibadah yang kemampuan badan menjadi syarat pelaksanaan, bukan syarat wajib, seperti haji dan umrah. Atau menguasai hal-hal yang bersifat penyempurna dalam sebuah ibadah, seperti pembagian harta zakat pada mereka yang berhak.

4. Ijab Kabul/Sighat

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari segi sighat/ Ijab dan qabul, diantaranya adalah:

- Bahasa dari pemberi kuasa harus mewakili kerelaan nya menyerahkan kuasa kepada al-wākil , baik berbentuk sharih (jelas) sebagaimana ucapan “Aku wakilkan kepadamu penjualan mobilku ini”, maupun kinayah (tersirat atau sindiran dan dapat di tafsirkan berbeda), seperti ucapan “aku jadikan dirimu menggantikan aku untuk rumah ini “.
- Dari pihak penerima kuasa (*al-wākil*) hanya cukup menerimanya (*qabul*) meskipun tidak ada ucapan ataupun tindakan.
- Bahasa penyerahan kuasa tidak dikaitkan dengan syarat tertentu, seperti ucapan,”jika nanti adikku telah pulang,

maka engkau menjadi wakilku untuk menjualkan mobil ini”. berbeda halnya jika syarat di berlakukan dalam urusan pembelanjaan pada jenis al- wakalah al- munjazah (wujud pengusaan yang telah ada), seperi ucapan “Aku wakulkan dirimu menjual rumah ini ,hanya saja tolong kamu jual hanya awal bulan juni saja”

- Sighat wakalah boleh dengan pembatasan masa tugas al-wākīl, seperti dalam tempo seminggu atau sebulan.

4. Jenis-Jenis Wakalah

Wakalah dapat dibedakan menjadi: al-wakalah al-ammah dan *al-wakalah al-khāṣṣah*.

a. *wakalah al- khāṣṣah* adalah wakalah dimana pemberian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan telah dijelaskan secara mendetail segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang diwākilkannya, seperti mengirim barang berupa pakaian atau menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu.

b. *Al-wakalah al- ammah* adalah akad wakalah dimana pemberian wewenang bersifat umum, tanpa adanya penjelasan yang rinci. Sepertibelikanlah aku komputer apa saja yang kamu temui. Selain itu juga dibedakan atas *al-wakalah al-muqayyadah* dan *al-wakalah muṭlaqah*, yaitu :

c. *Al-wakalah al-muqayyadah* adalah akad wakalah dimana

wewenang dan tindakan si wākil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya jualan mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit.

- d. *Al-wakalah al-muṭlaqah* akad wakalah dimana wewenang dan wākil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya juallah mobil ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.

3. Wadiah

Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Mekaar Syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.⁸⁵

1. Definisi Wadiah (Titipan)

Kata wadi'ah diambil dari *wada'a asy-syai'a* yang berarti meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang ditipkan oleh seseorang kepada orang lain agar dijaganya disebut dengan wadi'ah karena dia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan tersebut.⁸⁶

2. Rukun dan Syarat Wadiah

Rukun *wadi'ah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul dengan ungkapan “saya titipkan barang ini kepada anda”, atau dengan kalimat yang semakna dengan hal ini kemudian pihak lain menerimanya. Rukun *wadi'ah* menurut jumhur ada tiga, yaitu dua orang yang berakad yang terdiri dari penitip dan penerima titipan (*wadi'* dan *muwadi'*). Sesuatu yang ditipkan (*wadi'ah* dan

⁸⁵ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>.

⁸⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta Pusat: PT Pena Pundi Aksara, 2009), 213.

muwada'), dan *sighat* (ijab dan kabul). Sedangkan syarat-syarat *wadi'ah* ada tiga pula antara lain :

1. Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Disyaratkan berakal dan mumayyiz meskipun ia belum baligh. Akad *wadi'ah* menjadi tidak sah apabila orang yang berakad itu anak kecil yang belum berakal dan orang gila.
2. *Wadiah* (sesuatu yang dititipkan). Disyaratkan berupa harta yang bisa diserahterimakan, maka tidak sah menitipkan burung yang diudara. Benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*.
3. *Sighat* (ijab dan kabul), seperti saya titipkan barang ini kepadamu”, jawabnya “saya terima”. Namun, tidak disyaratkan lafal kabul, cukup dengan perbuatan menerima barang titipan, atau diam. Diamnya sama dengan kabul sebagaimana dalam *mu'athah* pada jual beli.⁸⁷

3. Jenis-Jenis Wadiah

1. *Wadi'ah yad Amanah* adalah transaksi penitipan barang/uang ketika pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang ditipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan dari perbuatan atau kelalaian penerima titipan.
2. *Wadi'ah yad Dhamanah* merupakan transaksi penitipan

⁸⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 161.

barang/uang ketika pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang atau titipan, dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.⁸⁸

4. Mudharabah

1. Definisi Mudharabah

Kata mudharabah diambil dari kata *adh-dharbu fil-ardhi* yang berarti “bepergian di muka bumi untuk berdagang”.

Mudharabah juga dinamakan dengan qiradh. Kata *qiradh* berasal dari kata *qardh* yang berarti “pemotongan” karena pemilik harta memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan memotong sebagian dari keuntungannya.

Selain itu, mudharabah juga dinamakan dengan muamalah.⁸⁹

Secara istilah, mudharabah adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Obyek yang diakadkan: modal, kegiatan usaha/kerja, keuntungan.⁹⁰

2. Rukun dan Syarat Mudharabah

⁸⁸ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), 159.


⁸⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, 167

⁹⁰ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah...*, 117.

Agar akad mudharabah menjadi sah maka ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, diantara rukunnya adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakad (*sahib al-maal* dan *mudharib*).
- b. Obyek mudharabah (modal dan usaha).
- c. Sighat/akad (ijab dan qabul).
- d. Nisbah (bagi hasil)

Sedangkan syarat-syarat akad mudharabah adalah sebagai berikut:

- 
- a. Pihak yang berakad harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerjasama mudharabah.
 - b. Obyek yang diakadkan harus dinyatakan dalam jumlah/nominal yang jelas, jenis pekerjaan yang dibiayai dan jangka waktu kerjasama pengelolaan dananya, dan nisbah pembagian keuntungan telah disepakati bersama dan ditentukan tata cara pembayarannya.
 - c. Sighat/akad. Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan; materi akad yang berkaitan dengan modal, kegiatan usaha/kerja serta nisbah telah disepakati bersama saat perjanjian/akad.⁹¹

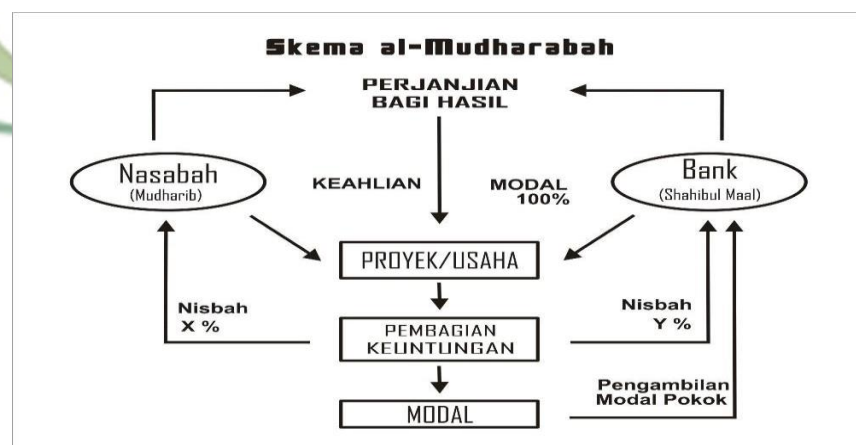
3. Jenis-jenis Mudharabah⁹²

⁹¹ Ibid.,

⁹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 172.

- a. Mudharabah *Muthlaqah* adalah akad kerjasama tanpa syarat (tidak terikat), pekerja bebas mengelola modal dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan. Seperti pekerjaan apa, barang apa saja, dengan siapa pekerjaan itu dilakukan.
- b. mudharabah muqayyadah adalah akad kerjasama dengan syarat (mengikat), penyerahan modal kepada pekerja disertai syarat- syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal. Seperti pekerjaan tertentu, barang-barang tertentu, dan sebagainya.

4. Skema Mudharabah



Gambar 2.1 Skema Akad Mudharabah

3. Tujuan PNM Mekaar Syariah

Secara umum tujuan dari kegiatan PNM Mekaar Syariah adalah memberikan tambahan modal bagi pemanfaat program. Yaitu dengan memberikan pinjaman tambahan modal usaha yang mana dapat dijadikan

akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin di usaha bagi para pemanfaat program.⁹³

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Istilah Ekonomi berasal dari bahasa Yunani “*Oikos Nomosi*” yang artinya rumah tangga atau pemilikan. Sedangkan menurut Suherman Rosyidi, pendapat populer yang berkembang di masyarakat mengenai ekonomi adalah suatu “gejala-gejala masyarakat yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia yang mana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran”.⁹⁴

Sedangkan pengertian dari ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama halnya dengan konsep ekonomi konvensional lainnya, namun dalam sistem ekonomi ini, terdapat nilai-nilai Islam yang menjadi landasan dan dasar dalam segala aktifitasnya.

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal.

⁹³ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>.

⁹⁴ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 4.

Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.⁹⁵ Sedangkan menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari tentang individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri.⁹⁶

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai ekonomi islam, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya, ekonomi Islam adalah suatu upaya untuk memformulasikan suatu ilmu ekonomi yang berorientasi kepada manusia dan masyarakat yang tidak mengakui individualisme yang berlebihan, serta tidak membenarkan kolektifitas yang melanggar hak-hak pereorangan, dengan berlandaskan kepada nilai-nilai Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.⁹⁷

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Aktivitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian adalah pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu yang lama diperlukannya individu yang bersangkutan mengatur hubungan yang disesuaikan dengan prinsip syariah dimana diwajibkan dalam suatu perjanjian dibuat secara tertulis atau yang disebut dengan akad. Terdapat beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep

⁹⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 14.

⁹⁶ Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), 20.

⁹⁷ Fadlan, "Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam", *Al-Ihkam*, Vol. V, No. 2, (2010), 272.

ekonomi dalam Islam. Beberapa dasar hukum Islam antara lain :

a. Al-Quran

Al-Qur'an telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui surat yaitu sebagai berikut.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطَافٍ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁹⁸

Selain itu, di dalam QS. An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk muamalat yang halal yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطَافٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka

⁹⁸ Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Wali Oasis Terrace Recident, 2010), 47.

*di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁹⁹

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Qur'an melarang Umat Islam untuk mempergunakan cara-cara yang batil seperti dengan melakukan kegiatan riba, melakukan penipuan, mempermainkan takaran, dan timbangan, berjudi, melakukan praktik suap-menyuap, dan cara-cara batil lainnya.

b. Hadits

Di dalam hadits telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci daripada Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari Sa'id Al-Khudri ra.

3. Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Ruang lingkup ekonomi Islam meliputi pembahasan terhadap berbagai perilaku manusia yang sadar dan berusaha untuk mencapai *falah*. *Falah* dapat diartikan sebagai suatu kebahagiaan dan kesejahteraan baik itu di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa perilaku ekonomi memiliki tiga permasalahan dasar, antara lain: konsumsi, produksi, dan distribusi. Dari ketiga aspek tersebut dipergunakan untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan. Konsumsi harus berorientasi pada masalah maksimum sehingga tetap terjaga keseimbangan antar aspek kehidupan. Sedangkan produksi harus

⁹⁹ Ibid, 80.

dilakukan secara efisien dan adil sehingga sumber daya yang tersedia dapat mencukupi kebutuhan seluruh umat manusia. Sementara itu distribusi sumber daya dan output harus dilakukan secara adil dan merata sehingga memungkinkan setiap individu untuk mendapatkan peluang guna mewujudkan kemaslahatan di hidupnya. Apabila ketiga aspek tersebut benar-benar diperhatikan dan individu selalu berusaha untuk mewujudkan masalah dalam berbagai aspek, maka kehidupan manusia akan bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat (*falah*).¹⁰⁰

4. Nilai-nilai Ekonomi Islam

a. Mengacu pada norma-norma moral Islam

Ketika seorang individu berusaha mendapatkan harta/materi dengan melakukan berbagai cara, namun perlu digaris bawahi yaitu harus sesuai dengan nilai-nilai Islam dimana harta/materi tersebut harus halal dan jauh dari unsur riba, tidak gharar (penipuan/curang) serta maysir (perjudian).

b. Keadilan Persaudaraan Universal

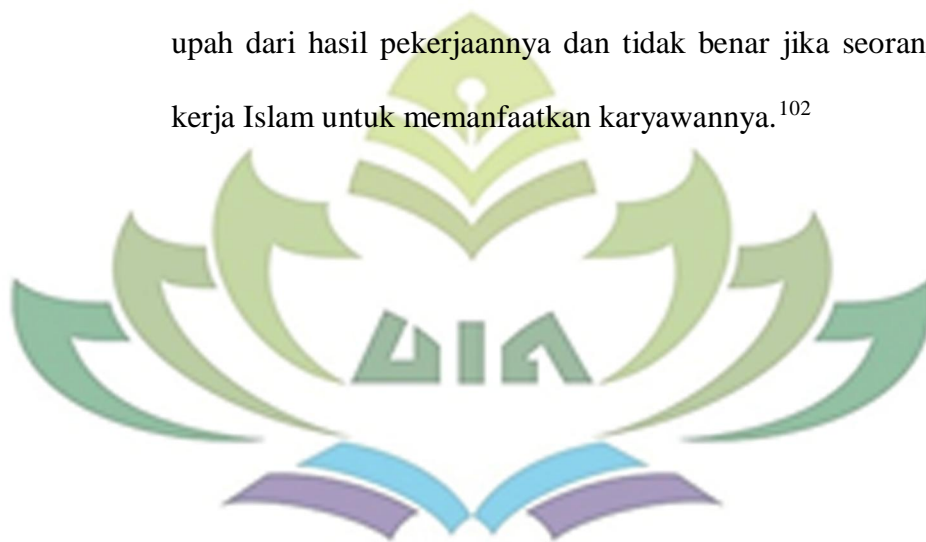
1. Keadilan Sosial

Dalam Islam semua manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah. Allah tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Yang menjadi pembeda adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan, dan pelayanan pada kemampuan.

2. Keadilan Ekonomi

¹⁰⁰ Muhammad Syahbudi, “Ekonomi Makro Perspektif Islam” dalam <http://repository.uinsu.ac.id/3577/1/diktat-ok.pdf>

Setiap individu akan mendapatkan hak ekonominya sesuai dengan kontribusi usahanya masing-masing pada masyarakat.¹⁰¹ Tiap-tiap individu pun harus mendapatkan apa yang menjadi haknya, dan bukan menghilangkan hak orang lain. Dalam hal hubungan antara pemberi kerja dan karyawan, Islam menempatkan pengaturan yang sesuai dan menetapkan norma-norma yang saling menguntungkan untuk keduanya. Seorang karyawan berhak atas upah dari hasil pekerjaannya dan tidak benar jika seorang pemberi kerja Islam untuk memanfaatkan karyawannya.¹⁰²



¹⁰¹ Ahmad Mundir, dkk, *Perbandingan Sistem Ekonomi* (Surabaya: Kopertais IV Press, 2015), 137- 138.

¹⁰² Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 126.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwimarta, Sri Sukesi, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 2*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Agustina, Desi. Anggota Pnm Mekaar Syariah. *Wawancara*. 2021.
- Agustina, Dewi. Anggota Pnm Mekaar Syariah. *Wawancara*. 2021.
- Ahmad Mundir, dkk. *Perbandingan Sistem Ekonomi*. Surabaya: Kopertais IV Press. 2015.
- Alwan, Siti Muflihah. “Kontribusi BMT Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi pada BMT Wilayah Tangerang Selatan”. Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.
- Anifatius Solihah, “*Pemberdayaan Kaum Perempuan dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Home Industry Bulu Mata Sokawera Cilongok Banyumas)*, (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).
- Arif, Zainal Kurniawan. “Penerapan Islamic Empowerment Melalui Program Pembiayaan Modal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Nurul Jannah Gresik”. Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.
- Asqolani, Aswan. “*Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP-SPP) Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun*”. Jurnal Alumni Program IV Manajemen Pemerintahan Universitas Jambi.
- Badan Pusat Statistik, “Persentase Ketenagakerjaan Provinsi Lampung 2020 “dalam <https://lampung.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/864/keadaan-ketenagakerjaan-provinsi-lampung-agustus-2020.html>.
- Basith, Abdul. *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*. Malang: UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI). 2012.
- Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 209.
- Bela, Dessy Vita. Ketua PNM Mekaar Syariah. *Wawancara*. 2021.
- Dermawan, Abdurraafi’ Maududi. “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Kreatif”, *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anarki*.
- Dewi, Cikita. Bendahara PNM Mekaar Syariah. *Wawancara*. 2021.

Dewi, Rosmala. Anggota Pnm Mekaar Syariah. *Wawancara*. 2021.

Fadlan. "Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam". *Al-Ihkam*. Vol. V, No. 2. 2010.

Fatimah, Siti. Anggota Pnm Mekaar Syariah. *Wawancara*. 2021.

Fitrina, Nika Rizqi. "Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil di Pedesaan (Studi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)". Skripsi-- Universitas Negeri Semarang. 2016.

Hadi, Agus Purbathin. "Konsep Pemberdayaan, Partisipasi, dan Kelembagaan dalam Pembangunan", *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*. 2009.

Handayani, Oktarina Dwi. "Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Sebagai Salah Satu Sarana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan Pedesaan Menurut Pandangan Islam". THE 1st UICIHSS.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2003.

Hasanah, Siti. "Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan). SAWWA. Volume 9, Nomor 1. Oktober, 2013.

Hidayat, Mohamad, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.

Hidayati, Dewi Ayu. "Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Perempuan Islam Aisyiyah Provinsi Lampung". *Jurnal Sosiologi*, Vol. 15, No. 2.

<https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>

Isnanur. Sekretaris Pnm Mekaar Syariah. *Wawancara*. 2021.

Kartasasmita, Ginanjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996.

Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*. Jakarta: Wali Oasis Terrace Resident. 2010.

Lexy, J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya, 2006. Nasution, S., *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bandung: Jemmers, 1982.

Mannan, Muhammad Abdul. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta :

- PT.Dana Bhakti Wakaf. 1997.
- Mayasari, Siti. Anggota Pnm Mekaar Syariah. *Wawancara*. 2021.
- Minarti. “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Ketrampilan Menjahit oleh Koperasi Wanita Wira Usaha Bina Sejahtera di Bulak Timur-Depok”. Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014.
- Muhammad Syahbudi, “Ekonomi Makro Perspektif Islam” dalam <http://repository.uinsu.ac.id/3577/1/diktat-ok.pdf>
- Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2004.
- Murtofiah. Anggota Pnm Mekaar Syariah. *Wawancara*. 2021.
- Musalamah, Siti. Anggota Pnm Mekaar Syariah. *Wawancara*. 2021.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.
- Nihayah, Ana Zahrotun. “Pengaruh Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Poverty Reduction dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bangilan Tuban)”. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2. 2015.
- Nurlatifah, Siti. Anggota Pnm Mekaar Syariah. *Wawancara*. 2021.
- Partini, Sri. Anggota Pnm Mekaar Syariah. *Wawancara*. 2021.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa. 2015.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*.
- Rahayu, Sri. Anggota Pnm Mekaar Syariah. *Wawancara*. 2021.
- Ridwan Mas’ud, Muhammad. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Rivai, Veithzal Rivai, Antoni Nizar Usman. *Islamic Economics Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori Ekonomi*

- Mikro dan Makro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta Pusat: PT Pena Pundi Aksara. 2009.
- Salim, Peter, dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ontemporer*, Jakarta: Modem English Press, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI – Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Standar Operasional Manajemen PNM Mekaar Syariah, Desa Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.
- Sugiana, Puji Meilita, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan*, Jakarta: Program Studi administrasi Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama. 2014.
- Sujarweni, V.Wiratna, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Sumodinigrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*,
- Susilo, Adib. “Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam”. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No. 02. Agustus, 2016.
- Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua. 2016.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustak a, 1989), hlm. 188.
- Veithzal Rivai, Andi Buchari. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009.
- Wanita*. Jakarta: Wali Oasis Terrace Recident. 2010.